LKIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang P4GN berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNNP Kalteng tahun 2020-2024 sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program P4GN.

Laporan ini menyajikan hasil capaian kinerja BNNP Kalteng selama satu tahun atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas P4GN di daerah. Pelaporan ini dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengatur, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNNP Kalteng dalam tahun 2021 yang meliputi kinerja Bidang di lingkungan BNNP Kalimantan Tengah dengan **12 Sasaran Kegiatan dan 17 Indikator Kinerja**. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh bidang, secara umum berbagai target dapat berhasil dicapai dengan cukup baik.Untuk pelaporan realisasi BNNP Kalimantan Tengah telah melakukan input data kedalam aplikasi pelaporan realisasi kegiatan dan anggaran dengan laman monevgar.bnn.go.id. Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja BNNP Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNNP Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua. Amin.

Palangka Raya, Januari 2022

Kepala BNNP Kalimantan Tengah

Roy Hardi Siahaan, S.IK, S.H, M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF LKIP BNNP KALTENG TAHUN 2021	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan	3
F. Struktur Organisasi	5
G. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja BNNP Kalimantan Tengah Tahun 2021	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNNP KALIMANTAN TENGAH	15
A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021	15
B. Evaluasi dan Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	17
C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021	58
BAB IV PENUTUP	59
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan kelembagaan Badan Narkotika Nasional, sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya struktur organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi diatur melalui Peraturan BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;**.**

Selanjutnya dalam kelembagaan BNN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, dalam melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Untuk implementasi Program P4GN, telah ditetapkan dalam Rencana Stategis (Renstra) BNNP Kalteng Tahun 2020-2024.

Sasaran ini terbagi dalam **12 (dua belas) sasaran kegiatan** dan terdiri dari **17 (tujuh belas) Indikator Kinerja.**

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengarih buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi sebanyak **1 kabupaten**; meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan jumlah kabupaten/kota dengan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba berkategori “tinggi” di wilayah provinsi sebanyak **2 kabupaten**; meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota dengan indeks kemandirian partisipasi berkategori “mandiri” di wilayah provinsi sebanyak **2 kabupaten** dan meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dengan dua indikator kinerja yakni jumlah kawasan di wilayah provinsi yang beralih status dari “bahaya” menjadi waspada sebanyak **1 kawasan** dan nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi sebesar **3,17**.

Bidang Rehabilitasi memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan dua indikator kinerja yakni jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih sebanyak **10 orang** dan jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis sebanyak **12 orang**; meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika dengan dua indikator kinerja yakni jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi sebanyak **1 Fasilitas** dan indikator kinerja jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi sebanyak **4 unit**; dan meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi dengan indikator kinerja indeks kepuasan layanan klinik rehabiliitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah **3,43**.

Bidang Pemberantasan memiliki 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan indikator kinerja jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan sebesar **3 jaringan** ; meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya dengan indikator kinerja jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 sebesar **45 berkas** dan meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika dengan indikator kinerja nilai tingkat keamanan, ketertiban sebesar **100** indeks dan kesehatan tahanan dan nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika sebesar **100** indeks.

Bagian Umum selaku penanggungjawab manajemen organisasi memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu : meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien dengan dua indikator kinerja yakni nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 86,49 dan indikator kinerja jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target tidak ada; meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur dengan dua indikator kinerja yakni nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 98,26 dan indikator kinerja jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target tidak ada.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Instansi Vertikal, BNN mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Tujuan tersebut harus dilaksanakan seimbang dengan satuan-satuan kerja yang ada dalam organisasi Badan Narkotika Nasional dengan sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi komponen rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan terbentuknya satuan kerja vertikal di daerah, diperlukan sistem pengukuran kerja yang seragam, tepat, akurat dan informatif terkait kinerja antara Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota sebagai alat kontrol pengawasan dan pengukuran kinerja.

Penyusunan LKIP berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi komponen rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. LKIP dapat terwujud dengan baik diperlukan adanya keterpaduan sistem antar unit pelaksana tugas di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNN Kab./Kota) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNP Kalimantan Tengah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah:

a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BNNP Kalimantan Tengah;
b. Sebagai ukuran tingkat keberhasilan/kegagalan satuan unit kerja/satuan kerja dalam mengemban tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
c. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/ menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran unit kerja/satuan kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
d. Sebagai sarana pemantauan dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi unit kerja/satuan kerja;

e. Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus dicapai;
f. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/penataan organisasi, kepegawaian, dan ketatalaksanaan, serta pengendalian sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

D. Ruang Lingkup

LKIP BNNP disusun berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh Kepala BNN RI atas pelaksanaan program P4GN di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kepala BNNP yang bertanggung jawab atas kinerja BNNK/Kota dibawahnya.

E. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

1. Kedudukan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah BNN dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN dan dipimpin oleh seorang Kepala BNNP.

2. Tugas.

Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Provinsi Kalimantan Tengah

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNP.
b. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan dan Rehabilitasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNNP.
d. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNNP.

f. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
g. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba.
h. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba.
i. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan/ atau pecandu Narkoba.
j. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
k. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba.
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
m. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNNP.
n. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
o. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNNP, dan kode etik profesi penyidik BNNP.
p. Pelaksanaan pengujian Narkoba / urine test.
q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

4. Kewenangan.

Kewenangan BNNP Kalimantan Tengah secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNNP Kalimantan Tengah berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

F. Struktur Organisasi.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi BNNP Kalimantan Tengah TA 2021

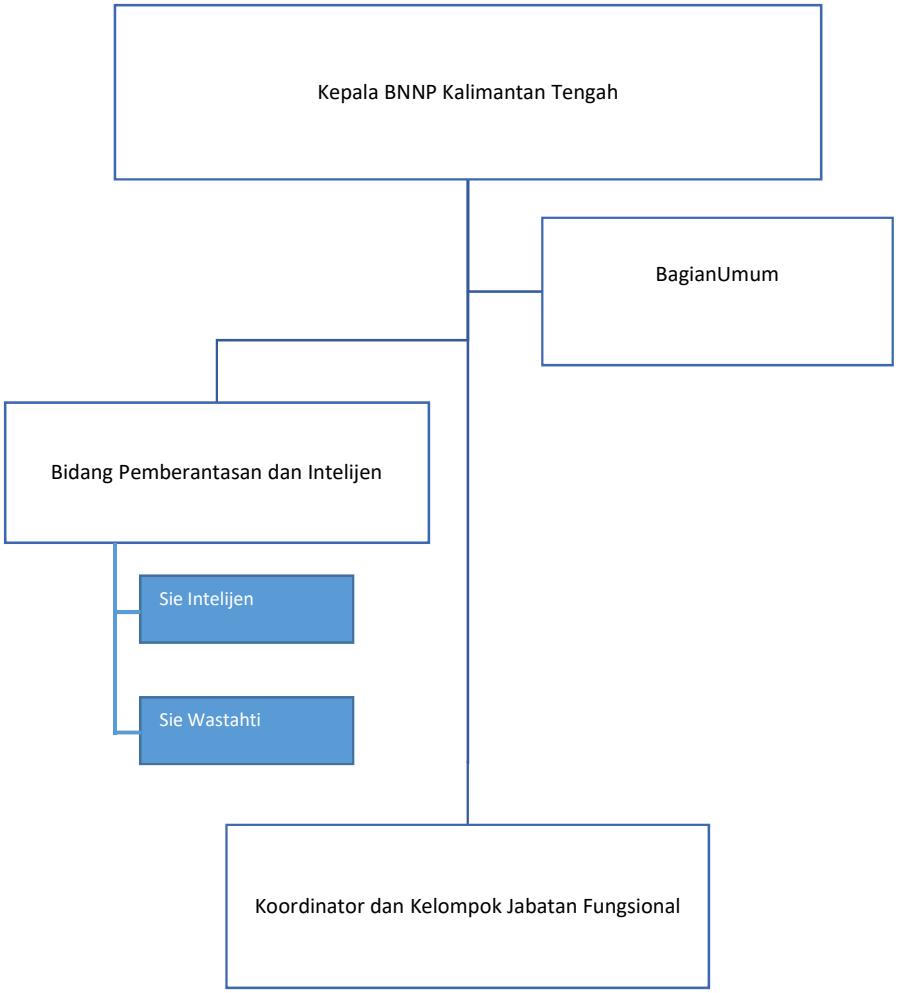

Jumlah pegawai BNNP saat ini 59 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. PNS : 36
2. POLRI : 15
3. PPNPN : 20

Sesuai DSP, kebutuhan pegawai untuk BNNP sebanyak 238 orang, namun saat ini yang terpenuhi baru sejumlah 71 orang. Hanya 29,83 % dari keseluruhan yang dibutuhkan.

G. Sistematika.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Bab II Perjanjian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Bab IV Penutup.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan berbagai aktivitas dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Renstra dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus mengantisipasi perubahan ke arah perbaikan pencapaian sasaran.

BNNP Kalimantan Tengah memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

B. Perjanjian Kinerja BNNP Kalimantan Tengah Tahun 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan mata rantai kegiatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja menjadi dasar bagi penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran setiap unit organisasi dan dasar penetapan bagi sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja dapat menjadi instrument dalam penentuan pemberian penghargaan ataupun sanksi.

1. Variabel

Variabel PK Satuan Kerja Vertikal terdiri atas sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target kinerja.

a. **Sasaran kegiatan** satuan kerja vertikal diadopsi dari sasaran program unit organisasi eselon I yang memiliki fungsi di wilayah karena satuan kerja vertikal merupakan miniatur program dalam lingkup lokal.

b. **Indikator kinerja kegiatan** adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan. Sebagaimana sasaran kegiatan satuan kerja vertikal, indikator kinerja kegiatan satuan kerja vertikal juga diadopsi dari indikator kinerja program unit organisasi eselon I. Pada level bidang di BNNP dan BNNK/Kota, indikator kinerja kegiatan merupakan turunan (derivatif) dari indikator kinerja Unit Kerja Eselon II di pusat yang relevan dengan bidang kerja masing-masing.

c. **Target kinerja** menunjukkan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan. Target kinerja BNNP merupakan turunan (derivatif) dari target kinerja Unit Organisasi Eselon I, sedangkan target kinerja BNNK/Kota merupakan turunan (derivatif) dari target kinerja BNNP. Target kinerja menunjukkan tingkat pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan. Target kinerja satuan kerja vertikal menggambarkan pencapaian kinerja di lingkup wilayah pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Pada level bidang di BNNP dan BNNK/Kota, target kinerja merupakan turunan (derivatif) dari target kinerja pada Unit Kerja Eselon II di pusat yang relevan dengan bidang kerja masing-masing.

PERJANJIAN KINERJA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Edi Swasono, M.M.

Jabatan : Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Petrus R. Golose

Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Maret 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Badan Narkotika Nasional	**Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah**
Dr. Petrus R. Golose	**Drs. Edi Swasono, M.M.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	1,8
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	15 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	-
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	3 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah	3,2
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Peta Jaringan
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10 Berkas
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah	99,5
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2 BNN Kabupaten/ Kota
12	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah	94
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 BNN Kabupaten/ Kota

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp 391.355.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp 163.835.000

3.	Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	732.664.000
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp	107.445.000
5.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	293.335.000
6.	Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	406.691.000
7.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp	19.248.000
8.	Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp	150.000.000
9.	Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	783.098.000
10.	Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	268.525.000
11.	Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp	-
12.	Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	319.665.000
13.	Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	66.087.000
14.	Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	59.777.000
15.	Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	3.790.102.000
16.	Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	79.809.000

Palangka Raya, Maret 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Badan Narkotika Nasional	**Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah**
Dr. Petrus R. Golose	**Drs. Edi Swasono, M.M.**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BNNP KALIMANTAN TENGAH

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

Penetapan Kinerja BNNP Kalteng tahun 2021 menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Kegiatan, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 17 (tujuh belas) indikator**.** Disamping itu BNNP Kalteng juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran kegiatan tahun 2021, serta penjelasan hasil capaian 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja, yang diuraikan sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2	1	50.00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	2	2	100.00
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi	2	2	100.00
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	1	100.00
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	1.8	3.17	176.11

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10	10	100.00
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	15	12	80.00
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	-	1	-
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	3	4	133.33
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah	3.2	3.43	107.19
8	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1	3	300.00
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	10	45	450.00
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100.00
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	100	100.00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah	99.5	86.49	86.92
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2	0	0.00
12	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah	94	98.26	104.53
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	0	0.00

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Kalteng selama kurun waktu tahun 2021, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2021 memiliki banyak indikator kinerja yang berbeda dengan indikator kinerja tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dibandingkan.

B. Evaluasi dan pengukuran capaian kinerja

Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan capaian kinerja BNNP Kalteng Tahun 2021, diuraikan evaluasi dan analisa capaian kinerja sasaran dan indikator kinerja sesuai bidang tugas program P4GN dengan uraian sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Advokasi (3247)

1.	***Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika***

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	PERSENTASE
Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kab/ Kota	2 Kab/Kota	100%

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat seksi Pencegahan melalui program Penyelenggaraan Advokasi memiliki sasaran yaitu **Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi adalah sebanyak 2 (dua) kab/ kota** dari total kab/kota di provinsi Kalimantan Tengah.

Definisi operasional : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Indikator perhitungan ini mengacu pada pengukuran indeks ketahanan keluarga yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner pada saat pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Adapun jumlah sasaran yang mengisi kuisioner adalah 10 (sepuluh) keluarga di masing-masing BNNP dan BNNK.

Sesuai dengan target nasional di tahun 2021, yang dikatakan tinggi adalah jika mencapai nilai 78,67. Berdasarkan pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga di tahun 2021 yang telah dirilis oleh BNN RI di wilayah kerja BNNP Kalimantan Tengah yakni sebagai berikut:

Satker	Nilai Dektari	Kategori
BNNP Kalimantan Tengah	86,25	Sangat Tinggi
BNNK Palangka Raya	82,41	Tinggi
BNNK Kotawaringin Barat	82,41	Tinggi
Rata-rata	83,69	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa kab/kota yang memenuhi kriteria dengan nilai Indeks Ketahanan Keluarga berkategori Tinggi adalah Kotawaringin Barat dan Palangka Raya yakni dengan nilai 82,41 (tinggi). Sehingga dapat kita simpulkan bahwa capaian target **Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi adalah sebanyak 2 kab/kota.** Dengan kata lain BNNP Kalimantan Tengah berhasil mencapai target.

Faktor keberhasilan adalah sifat antusiasme yang tinggi dari peserta saat mengikuti Pelatihan Ketahanan Keluarga sehingga pengetahuan yang didapat dapat menjawab kuisioner dengan baik. Rekomendasi/tindak lanjut ke depan ialah dilakukan monev terhadap keluarga yang telah mengikuti fasilitasi ketahanan keluarga.

Inovasi/ upaya perbaikan atas LKIP sebelumnya adalah agar lebih banyak lagi kota/kab yang melakukan pelatihan ketahanan keluarga. Efisiensi sumber daya dilakukan dengan melaksanakan kegiatan di Desa Bersinar BNNP. Faktor Lain yang mempengaruhi kinerja adalah pandemi Covid 19, sehingga pelaksanaan kegiatan bergantung dari persetujuan satgas Covid 19.

a. Kegiatan yang telah dilakukan

BNNP Kalteng telah melakukan rangkaian kegiatan advokasi di tahun 2021 yakni melakukan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Selain itu, BNNP Kalteng dan jajaran juga melaksanakan Program Desa Bersinar yakni sebanyak 5 desa dengan rincian sebagai berikut:

SATKER	2020	2021
BNNP KALTENG	-	1. KELURAHAN KERENG BANGKIRAI
BNNK PALANGKA RAYA	1.KELURAHAN PAHANDUT (KAMPUNG PUNTUN)	2. KELURAHAN SABARU 3. KELURAHAN LANGKAI (FLAMBOYAN BAWAH)

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah desa yang menjadi desa bersinar meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana di tahun

BNNK KOTAWARINGIN BARAT	2. DESA BUMI HARJO	4. DESA PASIR PANJANG 5.DESA TANJUNG TERANTANG

tersebut terbentuk 2 (dua) desa bersinar sedangkan di tahun 2021 terbentuk 5 (lima) desa bersinar yang baru.

b. Hambatan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja ini adalah karena masih dalam masa pandemi Covid-19, maka pelaksanakan kegiatan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan dilaksanakan di saat-saat yang diperbolehkan oleh satgas covid.

c. Rencana Kegiatan ke depan:

Tim BNNP Kalteng akan melakukan koordinasi yang lebih baik dan melanjutkan rangkaian kegiatan advokasi diantaranya:

1. Mengembangkan desa bersinar yang telah dibentuk sehingga dapat secara mandiri melaksanakan kegiatan-kegiatan desa bersinar;
2. Menambah desa bersinar baru sehingga lebih banyak lagi desa yang bebas dari narkoba;
3. Melakukan Pemantauan secara berkelanjutan kepada keluarga yang telah mendapatkan Fasilitasi Ketahanan Keluarga.

2. Informasi dan Edukasi (5936)

2.	***Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika***

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Informasi dan edukasi merupakan kegiatan dalam program pencegahan P4GN. Tujuan dari kegiatan ini adalah penyebarluasan informasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat di semua lapisan baik melalui tatap muka (talk show) dengan masyarakat, Kampanye /Pagelaran seni, media cetak, radio dan media online serta media-media lainnya yang dapat digunakan secara efektif, kreatif dan tepat sasaran.

Selain itu, di tahun 2021 ini terdapat program baru yakni Program Pelatihan Softskill kepada SLTP dan SLTA sederajat.

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	PERSENTASE
Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kab/ Kota	1 Kab/ Kota	50%

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat seksi Pencegahan melalui program Informasi dan Edukasi memiliki sasaran yaitu **Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi sebanyak 2 kab/ kota** dari total kab/kota di provinsi Kalimantan Tengah.

Definisi operasional : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

Indikator perhitungan ini mengacu pada pengukuran indeks ketahanan diri remaja (DEKTARI) yang dilakukan melalui penyebaran kuisioner secara online melalui aplikasi DEKTARI. Adapun jumlah sasaran yang mengisi kuisioner adalah minimal 100 (seratus) orang di masing-masing BNNP dan BNNK. Adapun klasifikasi dalam menentukan nilai DEKTARI yakni sebagai berikut:

Tabel. 3

Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba

Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri (anti) Narkoba
Sangat rendah	≤ 45.97
Rendah	45.98 – 49.73
Tinggi	49.74 – 53.50
Sangat tinggi	≥ 53.51

Berdasarkan tabel diatas, angka Dektari dikatakan tinggi apabila mencapai nilai 49,74-53,50. Sesuai dengan target nasional di tahun 2021, yang dikatakan tinggi sesuai dengan target adalah jika mencapai nilai 51. Sesuai dengan tabel dibawah ini:

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Deputi Bidang Pencegahan
Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50.03	51	52	53	53.51	Direktorat Informasi dan Edukasi (Anak dan Remaja)
Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	N/A	+0,01	+0,01	+0,01	+0,01	Direktorat Advokasi (Dewasa dan Keluarga)

Sesuai dengan pengukuran Dektari di tahun 2021 yang telah dirilis oleh BNN RI di wilayah kerja BNNP Kalimantan Tengah yakni sebagai berikut:

Satker	Nilai Dektari	Kategori
BNNP Kalimantan Tengah	49,51	Rendah
BNNK Palangka Raya	49,12	Rendah
BNNK Kotawaringin Barat	55,51	Sangat Tinggi
Rata-rata	51,38	Tinggi

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa kab/kota yang memenuhi kriteria dengan nilai Dektari tinggi adalah Kotawaringin Barat yakni dengan nilai 55,51 (sangat tinggi) dan untuk Kota Palangka Raya masih termasuk kategori rendah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa capaian target **Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi adalah sebanyak 1 kab/kota.** Dengan kata lain BNNP Kalimantan Tengah masih belum berhasil mencapai target.

Faktor kegagalan adalah pengisian dilakukan oleh peserta secara online melalui smartphone masing-masing sehingga sulit dipantau, selain itu apabila peserta mengisi secara tidak serius akan menghasilkan jawaban yang kurang pas sehingga berpengaruh pada nilai indeks yang rendah. Permasalahan terjadi pada saat pengisian kuesioner terdapat peserta yang mengisi tidak serius, sinyal yang tidak stabil sehingga dapat mengganggu saat pengisian. Rekomendasi/ tindak lanjut ke depannya adalah untuk pengisian harus didampingi.

Inovasi/ upaya perbaikan atas LKIP sebelumnya yakni melakukan sosialisasi terkait materi Ketahanan Diri Remaja sebelum melakukan pengukuran indeks. Efisiensi sumber daya dilaksanakan dengan pengisian kuisioner dapat dilakukan dalam satu tempat pelaksanaan.Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah pandemi Covid 19, sehingga pelaksanaan kegiatan bergantung dari persetujuan satgas Covid 19.

a. Kegiatan yang telah dilakukan

Selama tahun 2021 telah dilakukan kegiatan Pelatihan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU sederajat yang merupakan program prioritas nasional. Selain itu, dilakukan informasi dan edukasi melalui tatap muka (talk show), informasi dan edukasi melalui media cetak dengan melakukan kerjasama dengan Koran lokal yaitu Kalteng Pos bentuk informasi adalah ajakan tentang "War on Drugs" berupa Iklan Kuping (Ear-Ads). Media online juga menjadi media dalam informasi dan edukasi , adapun media online yang kerjasama dengan BNNP Kalteng adalah *http://prokalteng.co* , BNNP Kalteng juga bekerjasama dengan Radio Lokal "Kalaweit" dan "KPFM" untuk melakukan Informasi dan edukasi melalui Radio berupa ajakan menjauhi narkoba dan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Kemudian BNNP Kalteng juga melakukan informasi dan edukasi melaui branding sarana public yakni dengan melakukan branding pada kapal wisata air sungai di Dermaga Kereng Bangkirai. Selain dari kegiatan yang telah dianggarkan di DIPA T.A 2021, BNNP Kalteng juga melakukan kegiatan-kegiatan non Dipa dalam bentuk KIE dan penyuluhan P4GN. Rincian kegiatan Informasi dan edukasi P4GN BNNP Kalteng dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel1

NO	KEGIATAN	Jumlah Kegiatan
1	Pelatihan Pengembangan Softskill di SMP dan SMU Sederajat	3
2	Informasi dan edukasi Melalui Talkshow	2
3	Informasi dan edukasi Melalui Kampanye / Pagelaran Seni	1
4	Informasi dan edukasi Melalui Media Cetak	12
5	Informasi dan edukasi Melalui Radio Daerah/Lokal	6
6	Informasi dan edukasi Berbasis Media Online (*Placement*)	6
7	Informasi dan edukasi melalui Media Branding Sarana Publik	1
TOTAL		**31**

b. Hambatan

Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan informasi dan edukasi karena semua program dalam informasi dan edukasi dapat dilaksanakan semua dan tuntas.

c. Rencana Kegiatan ke depan:

Dalam upaya meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka rencana kegiatan ke depan adalah sebagai berikut :

a. Melakukan kegiatan Informasi dan Edukasi dengan meningkatkan kreatifitas dalam penyampaian informasi P4GN sehingga dapat lebih menarik masyarakat;

b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dan media untuk mencapai output yang diharapkan.

3. Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Peran Serta Masyarakat (PSM)

3.	***Sasaran :*** **Meningkatnya Kesadaran Dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN**

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	PERSENTASE
Jumlah kab/kota dengan IKP berkategori "Mandiri" di Wilayah Prov. Kalteng	2 Kab/Kota	2 Kab/Kota	100.0 %

Faktor keberhasilan tercapainya indikator kinerja adalah terlibatnya pemangku kepentingan mulai dari awal kegiatan menjadi faktor keberhasilan program dan pada pelaksanaan pengembangan kapasitas dalam rangka poembentukan penggiat dihadiri langsung oleh pengambil kebijakan baik di Instansi pemerintah, pendidikan dan dunia usaha. Permasalahan yang terjadi adalah proses advokasi dalam rangka

menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masih terus berlangsung hingga akhir tahun, tidak cukup waktu untuk mengadvokasi semua pemangku kepentingan. Rekomendasi/ tindak lanjut ke depannya adalah setelah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman, perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama (PKS) dan pembuatan rencana aksi daerah di OPD-OPD baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kab/Kota.

Inovasi/ upaya perbaikan atas LKIP sebelumnya yaitu pelibatan secara langsung dari pengambil kebijakan suatu instansi pemerintah, institusi pendidikan dan dunia usaha.Efisiensi sumber daya dilakukan dengan bermitra bersama berbagai stahekholder dengan membuat perjanjian kerjasama, ini sangat membantu karena minimnya sumber daya yang ada baik materil maupun SDM.Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah adanya regulasi-regulasi dari tingkat pusat yang dijadikan dasar bagi pelaksana program untuk terus melakukan advokasi serta dukungan dari pimpinan dan semangat dari tenaga-tenaga pelaksana.

a. Kegiatan yang telah dilakukan

Pelaksanaan program peningkatan peran serta masyarakat dengan melakukan advoaksi kebijakan kabupaten/Kota tanggap ancaman narkoba (KOTAN), Adapun startegi yang diterapkan untuk mendukung kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba adalah pertama, penguatan kelembagaan baik internal maupun eksternal bersama pemangku kepentingan dalam mewujudkan KOTAN, kedua, pengembangan kapasitas lembaga melalui advokasi KOTAN oleh BNNP Kalteng, ketiga pelibatan seluruh pemangku kepentingan dan komponen masyarakat untuk KOTAN, antara lain Instansi pemerintah, lingkungan swasta .dan lingkungan pendidikan, keempat pengembangan kegiatan terkait KOTAN yang berasaskan kearifan loka, tematik, dan mengacu pada potensi daerah masing-masing, kelima pengembangan KIE yang tepat sebagai upaya promotif anti narkoba melalui media sosial, media digital, media konvensional dan keenam pelaksanaan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota terkait KOTAN, serta pemberian penghargaan KOTAN.

Dalam hal penguatan kelembagaan, secara internal telah dilakukan rapat kerja teknis dengan BNNK jajaran dan secara ekternal telah dilakukan rapat koordinasi dengan dengan melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

serta stakeholder lainnya. Setelah itu dilakukan pengembangan kapasitas dan pembinaan berupa workshop penggiat P4GN, sinkronisasi program KOTAN, konsolidasi program KOTAN dan Asistensi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder dalam pelaksanaan KOTAN. Selain itu juga telah dilakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti penandatangan nota kesepahaman antara BNNP kalteng dengan Universitas Kristen Palangka Raya (UNKRIP), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMP), Univesitas Palangka Raya (UPR) Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Provinsi Kalteng dan beberapa stakohelder yang masih proses reviu untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan KOTAN.

Berikut Kabupaten/Kota dan lembaga yang telah berhasil di Advokasi selama tahun 2021 adalah :

No	Berdasarkan Output	Jenis Partisipasi	Jumlah Instansi/Lembaga Masyarakat yg diberdayakan	Capaian Output	Akumulasi dgn BNNK
1	Advokasi kebijakan Kab/Kota dan lembaga yang partisipatif dalam P4GN	1. Nota kesepakatan antara BNNP Kalteng dengan Pemko Palangka Raya 2. Pembentukan Tim P4GN Kota Palangka Raya 3. Kesepakatan bersama pelaksanaan P4GN antara BNNP Kalteng dengan Pemkab Kotawaringin Barat 4. Perjanjian Kerjasama dalam pelaksanaan P4GN dengan Pemkab Kotawaringin Barat 5. Diseminasi informasi (Sosialisasi melalui Tatap muka Spanduk)	1. Pemko Palangka Raya 2. Pemkab Kotawaringin Barat 3. Sekretariat Pemkab Kotawaringin Barat 4. Perguruan Tinggi (UNKRIP, IAIN, IAKN, UMP, UPR) 5. Ormas Jaringan Pengusahan Nasional (Japnas) Prov, Kalteng 6. Balai karatina Pertanian Palangka Raya 7. FIF Finance Cabang Palangka Raya 8. Badan Kesbangpol Kab. Kotawaringin Barat 9. SMKN 2 Pangkalan Bun 10. SMPN 7 Palangka Raya 11. Bank Kalteng 12. BKPSDM Kota Palangka Raya	**2 Kab/ Kota** **4 lembaga**	**2 Kab/ kota** **12 lembaga**

		6. Pemberdayaan Masyarakat Melalui tes Urine			

b. Hambatan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan program pemberdayaan peran serta masyarakat khusus advokasi kebijakan KOTAN menjadi kurang optimal, diantaranya :

1. Kurangnya konsistensi lembaga dalam mengikuti proses kegiatan pemberdayaan.
2. Pengambil kebijakan dalam instansi/lingkungan selalu mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan.
3. Sebagian peserta kegiatan tidak melaporkan hasil kegiatan (rencana tindak lanjut) kepada pimpinan lembaga dan juga pelaksanaan kegiatan tidak dilaporkan ke BNNP Kalteng
4. Belum semua instansi menerapkan regulasi atau aturan-aturan yang mengikat dalam hal P4GN dan regulasi yang sudah ada belum dilaksanakan dengan baik.
5. Penganggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat anti narkoba belum menjadi prioritas di beberapa lembaga dikarenakan belum masuk dalam penilaian kinerja lembaga
6. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan masih dalam bentuk penyuluhan, spanduk, brosur, sticker, radio dan tes urine
7. Program pemberdayaan pada BNNK belum sesuai dengan timeline yang seharusnya yang menyebabkan sebagian program pemberdayaan belum terlaksana hingga triwulan ketiga, hal ini disebabkan dengan kondisi pendemi Covid-19 sehingga kegiatan-kegiatan terutama kegiatan tatap muka tidak dapat dilaksanakan sesuai timeline

c. Rencana Program Kedepan:

BNNP Kalteng akan terus meningkatkan advokasi kebijakan KOTAN , pembinaan dan koordinasi serta melanjutkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan

seperti melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan regulasi berupa perda, pembentukan tim KOTAN, pembuatan RAD, Sosialisasi, deteksi dini melalui tes urine, monitoring dan evaluasi pada pada instansi pemerintah, lingkungan swasta, masyarakat dan pendidikan terutama pada 5 (lima) kabupaten yang secara vertikal belum terbentuk BNNK.

4. Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif (Dayatif)

4.	***Sasaran : Meningkatnya Upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan secara berkelanjutan***

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	PERSENTASE
Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada”	1 kawasan/ wilayah	1 kawasan/ wilayah	100 %
Nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi	1.8	3.17	176,11 %

Faktor keberhasilan adalah terlibatnya para pemangku kepentingan yang ada di wilayah kawasan rawan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi sehingga mereka mempunyai rasa memiliki atau menjadi bagian dari program menjadi kunci keberhasilan program disamping itu tenaga pelaksana program terus mengadvokasi mereka untuk terus berupaya mengubah kawasan rawan menjadi kawasan bersih dari narkoba.Permasalahan dalam pelaksanaan program adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat kawasan rawan terhadap BNNP dan program BNNP yang memang memerlukan waktu. Hal ini berpengaruh terhadap dukungan beberapa komponen masyarakat terhadap program. Rekomendasi/ tindak lanjut ke depannya dalam hal pengembangan program kewirausahaan yang telah dibentuk di kawasan rawan perlu keeterlibatan secara maksimal dari dunia usaha dalam hal pemasaran dan permodalan, sedangkan dari kalangan akademisi perlu dukungan riset dan penlitian terkait kawasan rawan untuk perancangan rencana intervensi.

Inovasi/upaya perbaikan atas LKIP sebelumnya adalah pemilihan sasaran yang tepat dan kemitraan yang tepat sangat berpengaruh pada keberhasilan program. Begitupun juga dukungan dari pemerintah setempat sangat membantu dalam proses pelaksanaan program. Efisiensi sumber daya dilakukan dengan melibatkan OPD-OPD dari awal, ini sangat membantu dalam hal pembinaan teknis, selalin itu bantuan peralatan bagi sasaran program sangat membantu BNNP Kalteng yang masih kekurangan sumber daya materil dan SDM. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah tim pelaksana program seharusnya memiliki motivasi, komitmen dan lingkungan kerja yang mendukung, ini sangat mempengaruhi pencapaian tujuan program.

Ringkasan Kegiatan:

a. Nama wilayah : Kelurahan Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng
b. Jumlah di Bina : 15 Orang yang berasal dari masyarakat kawasan rawan dan masyarakat yang mempunyai keluarga mantan pecandu Narkoba.
c. Pelatihan lifeskill : Handy craft (Anyaman tanaman purun)
d. Pihak/Instansi Pemerintah yang Membantu :
    1. Pusat Kerajinan Jawet Nian (Dukungan Teknis)
    2. Dinas Koperasi & UKM (Pelatihan + Bantuan Mesin Jahit)
    3. Pemerintah Kelurahan Kereng Bangkirai (Pembentukan Kelompok UKM dan Pemasaran melalui Pameran)
    4. SMKN 1 Palangka Raya (Pembuatan Mesin Pemipih Purun)
    5. Ketua RT/Tokoh Masyarakat; Mendampingi masyarakat binaan dan menjadi fasilitator antara masyarakat binaan dengan BNNP Kalteng dan Pemerintah setempat
e. Kawasan : Perkotaan.
f. Pada akhir tahun diadakan perhitungan Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba dengan menggunakan kuesioner. Pengambilan data dengan menggunakan kuesioner ke 15 orang warga penerima manfaat, adapun hasilnya sbb:

HASIL PERHITUNGAN KUESIONER INDEKS KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN NARKOBA
PROGRAM PEMBERDAYAAN ALTERNATIF DI KEL. KERENG BANGKIRAI - BNNP KALTENG TAHUN 2021

No	Variabel	Indikator	Bobot	Responden 1	Responden 2	Responden 3	Responden 4	Responden 5	Responden 6	Responden 7	Responden 8	Responden 9	Responden 10	Responden 11	Responden 12
1	Indikator Pokok Kerawanan Narkoba	Adanya Bandar Narkoba	8	1	4	3	3	4	4	4	4	4	1	4	4
2		Adanya Produksi Narkoba	7	2	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
3		Adanya Entry Point Narkoba	6	2	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
4		Adanya Kurir Narkoba	5	1	3	3	4	4	4	4	4	4	1	4	4
5		Adanya Pecandu Narkoba	4	1	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
6		Adanya Kasus Narkoba	3	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
7		Adanya BB Narkoba	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
8		Adanya Kejahatan Umum	1	3	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4
9	Indikator Pendukung	Terawasinya Tempat Hiburan	5	1	1	4	3	4	4	4	4	4	4	1	4
10		Menurunnya Angka Kemiskinan	4	1	1	1	1	4	1	1	4	1	1	3	1
11		Terawasinya Kos-kosan	3	1	2	4	1	1	3	4	2	1	1	4	3
12		Bertambahnya Sarana Publik	2	2	4	1	3	1	1	1	2	2	4	4	1
13		Meningkatnya Interaksi Sosial	1	4	4	2	3	2	4	2	2	2	2	2	4
14	Tingkat Keberhasilan Program	Hasil yang dirasakan Masy	7	4	4	4	2	3	4	3	3	3	4	4	4
15		Keberlanjutan Program	6	4	4	2	2	4	4	2	4	2	4	2	4
16		Pelaksana Program	5	3	3	1	2	2	3	1	1	2	3	3	3
17		Pelaksanaan Program	4	4	4	2	4	4	4	2	4	2	2	4	4
18		Sinergi Instansi Pemerintah	3	4	4	2	3	3	4	3	1	3	4	4	4
19		Kemitraan Dunia Usaha	2	4	4	3	2	4	3	1	1	1	3	3	3
20		Dampak Keberdayaan Masy	1	4	4	1	3	4	4	3	4	2	4	4	4
		Jumlah Total (N=20)	**79**	**193,00**	**269,00**	**237,00**	**200,00**	**279,00**	**288,00**	**244,00**	**267,00**	**241,00**	**227,00**	**276,00**	**288,00**
		Nilai IKKR		**2,44**	**3,41**	**3,00**	**2,53**	**3,53**	**3,65**	**3,09**	**3,38**	**3,05**	**2,87**	**3,49**	**3,65**
		Nilai IKKR Rata-rata		**3,17**											
		Nilai IKKR Konversi		**79,35**											
		Kategori IKKR		**C**											
		Kriteria Keterpulihan		**SIAGA**											

Dari hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa indeks keterpulihan kawasan rawan (IKKR) pada wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai adalah “Siaga” dengan Nilai IKKR 3,17 (SIAGA), jika dibandingkan dengan hasil pemetaan kawasan rawan pada awal tahun 2021 dengan menggunakan tools 8 indikator pokok dan 5 Indikator pendukung wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dalam kategori “Bahaya”dan hasil IKKR awal dengan nilai 1,55 (BAHAYA). Ini berarti kondisi kawasan tersebut lebih baik (pulih). Namun ada 2 responden hasil kuesionernya masih kategori “Waspada”

Selain itu juga telah dilakukan perhitungan kuesioner program dan kegiatan kewirausahaan (KPKK) untuk mengevaluasi program dan kegiatan kewirausahaan masyarakat yang telah dilakukan di kawasan rawan, ada 10 aspek yang dinilai yaitu :

1. Aspek Program Kewirausahaan
2. Aspek Manajemen Program
3. Aspek Jejaring Kerja Dalam Program
4. Aspek Dukungan Pemerintah Daerah Dalam program
5. Aspek Dukungan Dunia Usaha Dalam Program
6. Aspek Dukungan Praktisi & Akademisi Dalam Program
7. Aspek Keberlanjutan Kegiatan Dalam Program

8. Aspek Pembinaan Usaha Dalam Program
9. Aspek Manfaat (Efek) Program Terhadap keberdayaan masyarakat
10. Aspek Dampak Program Terhadap Lingkungan Bersih Narkoba

Aspek-aspek tersebut dituangkan dalam kuesioner Program dan kegiatan Kewirausahaan (KPKK) dan kuesioner tersebut diisi oleh warga penerima program lalu diolah dengan hasil perhitungannya sbb:

HASIL PERHITUNGAN KUSIOENER PENILAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN ALTERNATIF DI KEL. KERENG BANGKIRAI - BNNP KALTENG TAHUN 2021

Respon-den	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Aspek 9	Aspek 10	Total	Rata-rata	Kategori
1	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	33	3,30	Sangat Baik
2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	38	3,80	Sangat Baik
3	4	2	3	1	2	1	1	2	2	1	19	1,90	Cukup
4	4	4	4	3	4	2	3	4	3	3	34	3,40	Sangat Baik
5	3	4	4	4	4	2	3	4	3	4	35	3,50	Sangat Baik
6	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	36	3,60	Sangat Baik
7	3	4	3	3	2	2	2	3	4	3	29	2,90	Baik
8	4	4	4	4	3	2	2	2	3	2	30	3,00	Baik
9	4	4	4	4	2	2	2	1	2	3	28	2,80	Baik
10	3	4	3	1	3	2	2	2	3	2	25	2,50	Cukup
11	3	4	2	4	4	3	4	4	3	3	34	3,40	Sangat Baik
12	4	4	2	2	1	1	3	4	3	3	27	2,70	Baik
Jumlah	44	46	41	37	34	26	32	37	37	34	368	36,80	
Rata-rata	3,67	3,83	3,42	3,08	2,83	2,17	2,67	3,08	3,08	2,83	3,07		Baik
Kategori	Sangat Bai	Sangat Bai	Sangat Ba	Baik	Baik	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		

Dari hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan kuesioner penilaian program dan kegiatan kewirausahaan bernilai 3,07 (baik)

Setelah dilakukan perhitungan dari 12 Kuesioner yang diisi oleh warga penerima program, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program dan kegiatan kewirausahaan masyarakat kawasan rawan Narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan penilaian masing-masing responden/Masyarakat (12 Responden) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan dengan kategori “Baik” (dengan tentang nilai 2,50 – 3,90) dengan rincian 6 responden kategori “sangat baik”, 4 responden kategori “baik” dan 2 responden kategori “cukup”
2. Berdasarkan penilaian responden/masyarakat terhadap 10 aspek pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan, dengan kategori “Baik” (dengan rentang nilai 2,17 – 3,42) dengan rincian 3 aspek “sangat Baik”, 6 aspek “Baik” dan 1 aspek “Cukup”
3. Nilai akhir rata-rata seluruh responden/masyarakat terhadap seluruh pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan, dengan kategori Baik dengan nilai rata-rata 3,07 (Baik).

a. **Kegiatan yang telah dilakukan**

Kawasan atau wilayah rawan yang di intervensi program pemberdayaan alternatif BNNP Kalimantan Tengah menyasar di Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau Kota Palangkaraya karena berdasarkan hasil pemetaan kawasan dengan menggunakan 8 indikator utama dan 5 indikator pendukung, daerah tersebut dikategorikan wilayah "BAHAYA". Pembinaan kawasan rawan narkoba oleh BNNP Kalimantan Tengah dilaksanakan dalam bentuk Bimtek lifeskill Anyaman tanaman purun. Pemberdayaan di wilayah ini sudah dapat dikatakan berhasil karena telah tumbuh pengrajin-pengrajin anyaman tanaman purun dan para peserta bimtek lifeskill telah membentuk Industri Kecil Menengah (IKM) "Tau Hinje" serta sudah memiliki "Galeri Tau Hinje" yang berada di Kelurahan Kereng Bangkirai . Berikut "transformasi" tanaman purun (Tanaman lokal/tumbuh alami) menjadi produk yang bernilai tinggi:

b. **Hambatan**

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja ini adalah masih kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat daerah rawan dengan berbagai latar belakang dan alasan. Program pemberdayaan alternatif membutuhkan peran serta seluruh pihak terutama dukungan dari dunia usaha dan akademisi. Program Pemberdayaan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena merubah cara pandang dan cara hidup masyarakat memerlukan waktu yang cukup panjang dengan dukungan sumber daya yang memadai.

c. **Rencana program kedepan**

BNNP Kalteng bersama dengan fasilitator akan melakukan bimtek fasilitator (pendamping), pelibatan stakeholder dan melakukan monitoring ke wilayah untuk mengetahui perkembangan program, selain itu juga terus akan membangun jejaring kerja kewirausahaan dengan para stakeholder yang ada.

Dalam hal perekrutan peserta bimbingan teknis *lifeskiil* akan lebih memprioritaskan kepada mantan pecandu Narkoba atau keluarganya dan masyarakat yang berada di lingkungan kawasan rawan Narkoba.

Rehabilitasi

5.	***Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi***

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	PERSENTASE
Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 petugas	10 petugas	100 %
Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	15 petugas	12 petugas	80 %

Indikator kinerja terkait jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih tercapai 100%. Dari target 10 petugas yang mendapatkan pelatihan,

realisasi 10 petugas yang diberikan pelatihan. Adapun petugas yang telah dilatih untuk layanan IBM yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	No. Hp	Ket
1.	Yedi Soriadi	Jl. Manduhara RT.05, RW.02 Palangka Raya	081346803937	Petugas Agen Pemulihan
2.	Suseno	Jl. Panenga Permai RT.01, RW.03 Palangka Raya	081251854028	
3.	Joko Setiadi	Jl. Panenga Induk Permai RT.01, RW.03	085350121446	
4.	Kevin Martinus	Jl. Sri Rejeki RT.07, RW.02 Palangka Raya	085245579891	
5.	Kurnia	Jl. Taheta II E No.11 RT.04, RW.02 Palangka Raya	081258827758	
6.	Yetri Oktaviani, S. Pd. K	Jl. Matal No.06 RT.04, RW.01 Palangka Raya	081255692320	
7.	Susilawati	Jl. Matal No.06 RT.04, RW.01 Palangka Raya	082157791940	
8.	Marli Juliadi	Jl. Basir Jahan, RT.04, RW.01 Palangka Raya	085248696366	
9.	Aji Ahmadi Akbar	Jl. Basir Jahan, RT.04, RW.01 Palangka Raya	085390496061	
10.	Muhammad Misbah, S. Pd. I	Jl. Tumbang Rungan RT.01, RW.01 Kelurahan Tumbang Rungan	081528882821	

Hambatan dan kendala :

Petugas IBM yang telah dilatih tidak menjalankan tugasnya secara penuh dan tidak semua petugas IBM melaksanakan tugas (Dari 10 orang hanya 4 orang yang aktif hal ini disebabkan karena tidak adanya dukungan operasional petugas IBM, wilayah kelurahan yang sangat luas sehingga sulit untuk dijangkau oleh Petugas IBM). Puskesmas tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rehabilitasi rawat jalan.

Rekomendasi dan tindak lanjut :

Melakukan pemilihan Petugas IBM dengan melibatkan Pihak Kelurahan setempat dan melakukan pemilihan sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk menjadi Petugas IBM. Memberikan informasi kepada Pihak Kelurahan agar dalam pemilihan Petugas IBM. Pihak Kelurahan meanggarkan dana transportasi bagi Petugas IBM

Inovasi/Upaya Perbaikan :

Melakukan koordinasi secara intens dengan Pihak Kelurahan untuk rekomendasi Petugas IBM yang memenuhi syarat, melakukan sinergitas terkait petugas atau relawan yang telah dibentuk Bidang P2M di wilayah dibentuknya IBM, Memberikan teknik pemantauan dan pendampingan melalui virtual kepada klien.

Indikator kinerja terkait jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis pada tahun 2021 dengan target 15 petugas yang kompeten, realisasinya yaitu sebanyak 12 orang petugas yang kompeten dengan capaian persentase sebanyak 80 %. Adapun daftar nama-nama petugas uji sertifikasi BNNP Kalimantan Tengah sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI	HASIL ASESMEN
1	dr. Nadya Normalia Muliansyah	BNNP Kalimantan Tengah	KOMPETEN
2	Riska Aprillia Yunartho, M. Psi., Psikolog	BNNP Kalimantan Tengah	KOMPETEN
3	Andri Firmansyah, AMK	BNNP Kalimantan Tengah	KOMPETEN
4	Yuanita Rahmawati, S. Psi	BNNK Palangka Raya	KOMPETEN
5	I Kadek Sutapa, S. Kep	BNNK Palangka Raya	KOMPETEN
6	Nova Dialusi Gultom, S. Psi	BNNK Kotawaringin Barat	KOMPETEN
7	dr. Yulinar N. Siringo, M. Sc., Sp. KJ	RSJD Kalawa Atei	KOMPETEN
8	dr. Vinny Safari, MM	RSUD Tamiang Layang	KOMPETEN
9	Heni Noveri, S. Psi	RSUD Tamiang Layang	BELUM KOMPETEN
10	dr. Butet	Puskesmas Pahandut	BELUM KOMPETEN
11	dr. Hj. Fitri Ningrum Intani	RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas	BELUM KOMPETEN
12	Berliana L. Batu, SKM., M. Kes	RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas	KOMPETEN

13	Mariasi, S. Kep., Ns	RSUD dr. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas	KOMPETEN
14	dr. Suprihatini, Sp. KJ., MM	RSUD Mas Amsyar Kasongan	KOMPETEN
15	A. Rizali Ramadhani, S. Psi	RSUD Kuala Pembuang	KOMPETEN

Hambatan dan kendala :

SDM yang telah memperoleh peningkatan kapasitas tidak dapat menyelenggarakan layanan rehabilitasi terkait sarana dan prasarana yang belum tersedia di lembaga tempat mereka bekerja sehingga petugas tidak mampu mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan saat kegiatan Pelatihan.

Rekomendasi dan tindak lanjut :

Melakukan Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi secara berkala kepada SDM dan Layanan Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi IP/KM

Inovasi/Upaya perbaikan :

Mendorong Pemda untuk menyiapkan tempat rehabilitasi serta melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam hal pengalokasian dana penyelenggaraan layanan rehabilitasi, Membangun jejaring kerja sama dengan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah serta melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga tersebut secara berkala.

6.	***Sasaran : Meningkatnya aksesibilitasi dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika***

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	PERSENTASE
Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	-	1	-
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	3	4	133,33%

Indikator kinerja tentang lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan target 0 (tidak ada), namun pada realisasinya Lembaga rehabilitasi Klinik Pratama BNNP Kalimantan Tengah memenuhi SPM di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dengan nilai 81,41 kategori B.

Hambatan dan kendala :

Anggaran yang ada di Klinik BNNP/Kab/Kota terbatas terkait pemenuhan sarana pra sarana dan dokumentasi penunjang layanan lainnya

Rekomendasi dan tindak lanjut :

Melakukan evaluasi dan pemenuhan sarana dan pra sarana yang ada di Klinik milik BNNP/Kab/Kota, memenuhi kelengkapan dokumen yang sesuai standar, dan melakukan peningkatan baik sarpras, penunjang layanan secara berkala.

Inovasi/Upaya perbaikan :

Petugas SPM melakukan koordinasi kepada Bidang Umum, Bidang Sarana dan Pra Sarana, dan Koordinasi secara intens kepada Kooridnator, Sub Koordinator, Staf BNNP/Kab/Kota untuk pemenuhan Layanan Rehabilitasi yang sesuai dengan SPM

Indikator kinerja terkait Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Tengah dengan realisasi sebagai berikut :

No	Fasilitas	Jumlah Pasien	Keterangan Fase IBM
1.	IBM Kereng Bangkirai - Sabaru	23 orang	Berkembang
2.	IBM Tumbang Rungan	0 orang	Bertumbuh
3.	IBM Hapakat	10 orang	Berkembang
4.	IBM GPN Bumi Harjo	10 orang	Tangguh
	TOTAL	43 orang	

Hambatan dan kendala :

Belum adanya perhatian pemerintah daerah terhadap LRKM yang ada, Belum optimalnya Sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan adanya LRKM maupun Layanan IBM secara lebih luas terkait tugas dan fungsi Petugas IBM dalam menyelenggarakan layanan rehabilitasi, serta Anggaran yang terbatas bagi Petugas IBM dalam melaksanakan layanan IBM bagi masyarakat di wilayah kelurahan masing-masing.

Rekomendasi dan tindak lanjut :

Membentuk dan mengoptimalkan IBM sebagai tempat layanan rehabilitasi, yang murah dan mudah di akses, Mengoptimalkan dan memberdayakan sumber daya yang ada di masyarakat melalui kegiatan intervensi berbasis masyarakat dengan pola dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, Sosialisasi program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba sebagai solusi terbaik dalam usaha demand reduction.

Inovasi/Upaya perbaikan :

Meningkatkan peran stakeholder untuk ikut berpartisipasi mendukung program rehabilitasi bagi pecandu dan atau penyalahguna narkoba, Meningkatkan peran penjangkauan melalui kegiatan test urine dan sweeping untuk meningkatkan jumlah pelayanan klien rehabilitasi, melibatkan Tokoh Masyarakat/Agama/Adat sebagai Petugas Agen Pemulihan yang mampu memahami Lingkup Wilayahnya.

7.	***Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi***

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	PERSENTASE
Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah	3,2	3,43	107,19 %

Indikator kinerja untuk indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran (BNNK Palangka Raya dan BNNK Kotawaringin Barat) dengan Target Nasional indeks sebesar 3,2 serta realisasi sebesar 3,43.

Adapun grafik dan tabel hasil indeks tersebut, yaitu :

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 2021: Rawat Jalan

No. Urut	Persyaratan		Sistem, Mekanisme dan Prosedur			Waktu Pelayanan		Biaya/tarif		Produk, Spesifikasi Jenis Layanan		Kompetensi Pelaksana			Perilaku Pelaksana		Penanganan Pengaduan, Saran		Sarana dan Prasarana	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sekor Total	69	64	63	66	65	64	62	70	73	66	59	69	61	59	63	73	62	64	67	64
Rata-rata	3,632	3,368	3,316	3,474	3,421	3,368	3,263	3,684	3,842	3,474	3,105	3,632	3,211	3,105	3,316	3,842	3,263	3,368	3,526	3,368
Rerata Tiap Unsur	3,500		3,404			3,316		3,763		3,289		3,316			3,579		3,316		3,447	
IKM	3,429																			
IKM	85,724																			

Nilai Interval dan Nilai Interval Konversi IKM			
Nilai Interval (25 - 100)	Nilai Interval (1 - 4)	Mutu	Kinerja Unit Pelayanan
88,31 - 100,00	3,533 - 4,00	A	Sangat baik
76,61 - 88,30	3,065 - 3,532	B	Baik
65,00 - 76,60	2,600 - 3,064	C	Kurang baik
25,00 - 64,99	1,000 - 2,599	D	Tidak baik

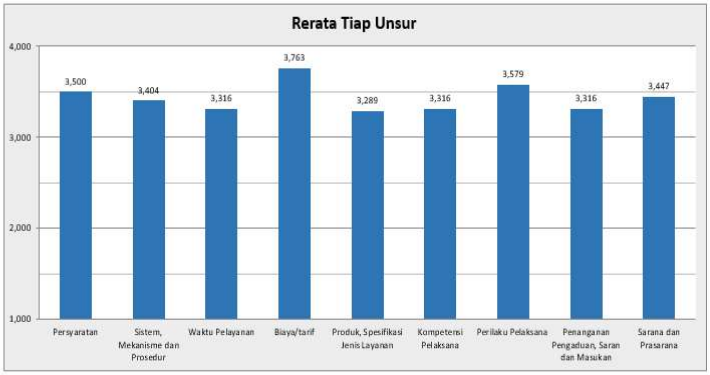

Hambatan dan kendala :

Klien kurang mendapatkan informasi maupun pemenuhan layanan rehabilitasi secara maksimal (dibuktikan dengan hasil rekap respon klien), Anggaran untuk pemenuhan sarana dan pra sarana terbatas

Rekomendasi dan tindak lanjut :

Melakukan peningkatan layanan, kapasitas petugas dan sarana pra sarana yang ada di Klinik Rehabilitasi BNNP Kalteng dan Jajaran

Inovasi/Upaya perbaikan :

Melakukan peningkatan dalam hal layanan kepada klien secara berkala, melakukan inovasi terkait kemudahan klien dalam menjangkau layanan rehabilitasi di BNNP Kalteng dan Jajaran (SKHPN Online),

Pemberantasan (Intelijen)

8.	***Sasaran :*** **Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika**

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	PERSENTASE
Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1 Jaringan	3 Jaringan	300 %

Dari target pemetaan 1 (satu) jaringan, BNNP Kalteng berhasil mencapai 3 (tiga) peta Jaringan, Yaitu :

1. Jaringan Diki (Banjarmasin – Palangkaraya)
2. Jaringan Nasir (Aceh - Medan - Jakarta - Banjarmasin – Palangkaraya)
3. Jaringan Sukis (Pontianak – Sampit)

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 terdapat peningkatan sebanyak 3 peta jaringan atau sebesar 50%, akan tetapi BNNP Kalimantan Tengah tetap dapat mencapai bahkan melebihi target yang telah diberikan.

Faktor keberhasilan :

- Tidak hanya memanfaatkan IT dalam memetakan jaringan tetapi juga human intelijen khususnya dalam melakukan profiling di lapangan.
- Melakukan profiling secara mendalam dari masing-masing pelaku yang terlibat dalam jaringan narkotika.
- Memahami pola atau sistem kerja dari jaringan tersebut

Faktor kegagalan :

- Jaringan narkotika memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyadapan.
- Pengungkapan jaringan yang melibatkan oknum narapidana seringkali gagal karena oknum pegawai Lapas yang ikut bermain untuk menghilangkan barang bukti.

Permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja adalah :

- Belum memadainya peralatan IT untuk mendukung kegiatan pemetaan jaringan khususnya dalam melakukan profiling dilapangan.
- Masuknya alat komunikasi ke dalam Lapas dimanfaatkan oleh oknum narapidana untuk mengendalikan jaringannya.

- Dengan semakin berkembangnya jaringan narkotika anggaran pemetaan jaringan dirasa masih belum cukup memadai.

Rekomendasi/tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya adalah :

- Berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen untuk mendapatkan alokasi peralatan IT seperti Cellebrite dan Direction Finder (DF).
- Menyusun kebutuhan anggaran real kegiatan penyelidikan berbasis IT untuk diajukan ke Direktorat Intelijen.
- Bekerjasama dengan Kadivpas Kemenkumham Kalteng dalam pengungkapan kasus yang melibatkan oknum narapidana.

Inovasi/ Upaya Perbaikan atas LKIP sebelumnya yakni berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk memperluas jaringan intelijen khususnya dalam rangka pengumpulan informasi terkait jaringan narkotika yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Efisiensi sumber daya dilakukan dengan bekerjasama dengan Polda dan BIN dalam kegiatan profiling dilapangan untuk mengatasi keterbatasan alat IT. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah proses penyelidikan berbasis IT hanya bisa dilakukan di BNN RI sehingga sangat bergantung dari alokasi anggaran yang ada.

Pemberantasan (Penyelidikan dan Penyidikan)

9.	***Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya***

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	PERSENTASE
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang P21	10 Berkas	45 Berkas	450 %

Dari target sebesar 10 berkas perkara, selama tahun 2021 BNNP Kalimantan Tengah dan jajaran berhasil menyelesaikan 45 LKN hingga tahap P21, sehingga persentase capaian adalah sebesar 450 %. Jika

dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya terdapat peningkatan jumlah kasus yang terungkap, seperti yang terlihat pada tabel dan grafik dbawah ini :

NO	SATKER	Tahun 2020		Tahun 2021	
		JUMLAH KASUS	P-21	JUMLAH KASUS	P-21
1	BNNP KALIMANTAN TENGAH	16	16	39	39
2	BNN KOTA PALANGKARAYA	4	4	4	4
3	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	3	3	2	2
	TOTAL	23	23	45	45

Faktor keberhasilan:

1. Dedikasi yang tinggi dari anggota bidang pemberantasan BNNP Kalimantan Tengah dalam mengungkap jaringan narkoba.
2. Informasi terkait jaringan narkotika yang akurat.
3. Koordinasi yang baik terjalin antara BNNP Kalteng dan stakeholder.
4. Kolaborasi dengan tim IT direktorat intelijen BNN RI.

Permasalahan :

1. Tidak adanya kendaraan operasional.
2. Belum memadai peralatan IT dalam mengungkap jaringan tindak pidana narkotika (celebrite dan df)
3. Kurangnya anggaran.
4. Kolaborasi dengan BIN, Ditkrimum dan Ditnarkotika Polda dalam peminjaman df.

Rekomendasi / tindak lanjut :

1. Berkoordinasi dan kolaborasi dengan direktorat intelijen untuk mendapatkan alokasi peralatan IT dalam rangka pengungkapan jaringan tindak pidana narkotika.
2. Memaksimalkan anggaran yang ada.

Inovasi / upaya perbaikan atas LKIP sebelumnya :

1. Melakukan kolaborasi dengan bin, polda, bnnp kalsel, bea cukai, kejaksaan dan kemenkumham.

Efisiensi sumber daya :

1. Kurangnya personil penyidik.
2. Masih ada penyidik yang belum mengikuti pendidikan kejuruan penyidikan dan belum memiliki skep penyidik.
3. Minimnya pelatihan penyidikan untuk meningkatkan kompetensi para penyidik.

Faktor lain mempengaruhi kinerja:

1. Covid 19 masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karena menyebabkan keterbatasan pergerakan anggota bidang pemberantasan dalam melaksanakan kegiatan pengungkapan jaringan.
2. Anggaran yang minim.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.

Pemberantasan (Pengawasan Tahanan dan BB)

10.	***Sasaran : Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika***

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	PERSENTASE
Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	100	100 %
Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non- Narkotika	100	100	100 %

Berdasarkan kegiatan pengawasan tahanan dan barang bukti yang telah dilaksanakan BNNP Kalteng, capain Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan sebesar 100 dengan rincian capaian sebagai berikut :

a. Metode Pengukuran

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian Nilai tingkat keamanan , ketertiban dan kesehatan tahanan adalah jumlah tahanan masuk sama dengan jumlah tahanan yang keluar termasuk kesehatan tahanan sampai dengan berkasnya dinaikkan ke penuntutan (P21) dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	Kasus	Jml Tahanan	Kesehatan	Nilai
1	Tahanan Masuk	37 tahanan	Sehat	100
2	Tahanan Keluar	37 tahanan	Sehat	100
	Nilai	100	100	100

Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika sebesar 100 dengan rincian capaian sebagai berikut :

NO	Barang bukti	Barang bukti masuk	Barang bukti dimusnahkan & Untuk keperluan lain (Sesuai UU 35 Tahun 2009)
1	Shabu	3.855,59 gram	3.855,59 gram
2	Ganja	1.020,6 gram	1.020,6 gram
3.	Tembakau Gorilla	5,4 gram	5,4 gram
	Nilai	100	100

Perbandingan data jumlah barang bukti dan jumlah tahanan T.A 2020 dan 2021 :

TAHUN	JUMLAH BB				JUMLAH TERSANGKA	
	SHABU	CARISOPRODOL	GANJA	TEMBAKAU SINTETIS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
2020	5510.55 GRAM	400.000 BUTIR	-	-	22	3
2021	3.855,59 GRAM	-	1.020,6 gram	5,4 GRAM	36	1

Faktor Keberhasilan :

a. Tidak ada tahanan yang meninggal dunia atau melarikan diri dari sel Rutan BNNP Kalteng.

b. Tidak ada barang bukti yang hilang dan semua bb narkotika sudah dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Permasalahan :

a. Terbatasnya anggaran kesehatan tahanan dan anggaran makan tahanan.

b. Terbatasnya anggaran perawatan BB non narkotika dan anggaran pemusnahan BB narkotika.

Rekomendasi/ Tindak lanjut : Koordinasi dengan pembina fungsi / Direktorat Wastahti.

Inovasi/ Upaya Perbaikan atas LKIP Sebelumnya :

a. Dukungan fasilitas CCTV oleh bagian Sarpras untuk meningkatkan pengawasan terhadap tahanan dan keamanan Rutan.

b. Meningkatkan Pengelolaan administrasi penyimpanan dan pengeluaran barang bukti narkotika dan non-narkotika yang terkomputerisasi

Faktor Lain yang Mempengaruhi Kinerja :

a. Terbatasnya kuantitas SDM di seksi Wastahti, terutama untuk penjagaan tahanan.

b. Belum ada CCTV yang mengarah ke brankas penyimpanan barang bukti.

Dukungan Manajemen

11.	***Sasaran :*** Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase
Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah	99.5	86.49	86.92
Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	2	0	0.00

Nilai Kinerja Anggaran diambil dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Nilai tersebut ditentukan oleh beberapa aspek dengan bobot sebagai berikut :

a. Capaian rincian output (43,5%)
b. Nilai efisiensi (28,6%)
c. Konsistensi penyerapan anggaran (18,2%)
d. Penyerapan anggaran (9,7%)

Nilai Kinerja Anggaran BNNP Kalimantan Tengah adalah 86,49 yang berarti tidak mencapai target tahun 2021 sebesar 99,5. Perhitungan nilai kinerja anggaran BNNP Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Indikator	Bobot	Capaian Indikator	Capaian Tertimbang
Capaian Rincian Output	43.50%	100.00%	43.50%
Nilai Efisiensi	28.60%	4.42%	17.46%
Konsistensi Penyerapan Anggaran	18.20%	87.67%	15.96%
Penyerapan Anggaran	9.70%	98.71%	9.57%
CAPAIAN SMART DJA			**86.49%**

Target indikator kinerja BNNP Kalimantan Tengah berikutnya adalah Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebanyak 2 BNNK. Setiap BNN Kabupaten/Kota memiliki target Nilai Kinerja Anggaran sebesar 90, namun seperti yang terlihat pada tabel berikut tidak ada BNNK yang berhasil mencapai target.

BNN Kabupaten/Kota	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase
BNNK Palangka Raya	90	84.89	94,32
BNNK Kotawaringin Barat	90	78.78	87,53

Permasalahan dalam pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian indikator untuk nilai efisiensi sangat rendah, hanya berkisar antara 4% sementara bobotnya mencapai hampir 30%. Penyerapan anggaran tidak lagi memiliki bobot setinggi tahun-tahun sebelumnya sehingga walaupun penyerapan anggaran lebih dari 95% namun Nilai Kinerja Anggaran rendah.

Rekomendasi/tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

- mempercepat pencapaian realisasi output untuk meningkatkan nilai efisiensi

- perlu dilakukan sosialisasi kepada bidang-bidang dan satker bahwa pencapaian output dan efisiensi penggunaan anggaran yang akan mampu meningkatkan Nilai Kenerja Anggaran
- update NKA pada aplikasi setelah penginputan baru dapat dilihat setelah 24 jam sehingga perlu dilakukan simulasi perhitungan sehingga nilai dapat diketahui tanpa melakukan penginputan

12.	***Sasaran :*** Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentase
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Tengah	94	98.26	104.53
Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2	0	0.00

Nilai IKPA BNNP Kalimantan Tengah 98,26 sehingga mencapai targetnya yang 94. Adapun Nilai IKPA BNNK Palangka Raya adalah 93,41 dan nilai IKPA BNNK Kotawaringin Barat adalah 90,36. Nilai IKPA kedua BNNK ini di bawah 94 sehingga tidak ada BNNK di wilayah provinsi Kalimantan tengah yang nilai IKPAnya mencapai target.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN diambil dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA sebagai berikut :

Penyesuaian Bobot 13 Indikator

$$Nilai\ IKPA = \sum_{n=1}^{13} (Nilai\ Indikator_n\ x\ Bobot\ Indikator_n) : Konversi\ Bobot$$

No.	Indikator	Bobot 2019	Bobot 2020	Bobot 2021
1.	Penyerapan Anggaran	20%	15%	15%
2.	Data Kontrak	15%	15%	10%
3.	Penyelesaian Tagihan	15%	12%	10%
4.	Capaian Output	-	10%	17%
5.	Pengelolaan UP dan TUP	10%	8%	8%
6.	Revisi DIPA	5%	5%	5%
7.	Deviasi Halaman III DIPA	5%	5%	5%
8.	LPJ Bendahara	5%	5%	5%
9.	Renkas	5%	5%	5%
10.	Kesalahan SPM	6%	5%	5%
11.	Retur SP2D	6%	5%	5%
12.	Pagu Minus	4%	5%	5%
13.	Dispensasi	4%	5%	5%
TOTAL		*100%*	*100%*	*100%*

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun elemen pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut:

1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
2. Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian.

3. Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin
4. Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (Maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani).
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor.
6. Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya)
7. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
8. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
9. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
10. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya. bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran
11. Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif. Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
12. Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00.
13. Kesalahan SPM yang diakibatkan kekurangtelitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

Untuk mengatasi permasalahan dan menaikan nilai IKPA ke depannya perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku, antara lain dengan melakukan hal –hal sebagai berikut :

1. Setiap hari membuka OM SPAN dan menu Monev Pelaksanaan Anggaran dan melihat elemen apa yang harus dilaksanakan dan perlu diperbaiki.
2. Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan.
3. Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran.
4. Melakukan konfirmasi rekening ke Bank yang dituju untuk cek ulang apakah rekening tersebut masih aktif atau tidak aktif, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya retur SP2D.
5. Pejabat Penandatangan SPM harus lebih cermat terhadap perubahan nama dalam rekening dan dirubah juga nama di Bank Pembayar dan di KPPN.

Kegiatan di bidang Dukungan Manajemen yaitu Sub Bag Administrasi, Sub Bag Perencanaan dan Sub Bag Sarana dan Prasarana, memiliki 4 target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja 2021.

Sub Bagian Administrasi

NO	KODE	INDIKATOR OUTPUT	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	3236.955	Layanan Manajemen Keuangan	25,295,000	25,112,801	99.28	9,120,000	10,800,000	118.42
2	3236.994	Layanan Perkantoran	126,060,000	125,910,000	99.88	128,235,000	128,235,000	100.00
3	3237.954	Layanan Manajemen SDM	28,935,000	26,738,500	92.41	48,875,000	41,562,500	85.04
4	3239.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	44,100,000	37,350,000	84.69	56,434,000	52,508,800	93.04
		JUMLAH	**224,390,000**	**215,111,301**	**95.86**	**242,664,000**	**233,106,300**	**96.06**

Untuk penyerapan di tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 karena banyaknya kegiatan yang dilaksanakan luring sejak pelaksanaan vaksin.

Sepanjang tahun 2021, kegiatan yang dilakukan pada Sub Bagian Adminstrasi adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan dilaksanakan empat kali dalam setahun dengan mengundang pengelola keuangan dan bendahara PNBP dari BNNK Kotawaringin Barat dan BNNK Palangka Raya.

(1) Rekonsiliasi dan penelaahan data keuangan

(2) Rekonsiliasi dan penelaahan data keuangan semester I

(3) Penyusunan Laporan PNBP semester I

(4) Penyusunan Laporan PNBP semester II

2. Layanan Perkantoran

Di dalam kegiatan ini terdapat anggaran untuk pembayaran Honor operasional satuan kerja, transport penyampaian SPM ke KPPN, transport koordinasi rekonsiliasi dan koordinasi laporan keuangan DJPBN, KPPN, dan KPKNL, dll.Tidak terdapat permasalahan dalam kegiatan ini karena pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi pembayaran honor dan transport giat tersebut. Setiap bulan rutin dibayarkan kepada pegawai yang berhak.

3. Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan

Dalam setahun terdapat dua kali pengambilan sumpah jabatan di BNNP Kalimantan Tengah, yakni :

1) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat fungsional an.Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNNK Palangka Raya a.n Dwi Susanti, S.I.Kom tanggal 30 September 2021.

2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan pejabat administrator an Kasi intel Bidang Pemberantasan a.n Nuzul tanggal 29 Desember 2021.

4. Pembinaan Jasmani Pegawai

Kegiatan senam (25 kali) dan bulu tangkis bersama (12 kali) dilaksanakan sepanjang tahun 2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

5. Pelayanan Kesehatan Pegawai

Dalam kegiatan ini terdapat pemenuhan kebutuhan barang operasional material kesehatan bulanan dan operasional penanganan pandemi Covid 19 berupa cairan pembersih, sabun cuci tangan dan hand sanitizer.

Beberapa kegiatan dikurangi dan ditiadakan karena adanya pandemi Covid-19 :

1. Pembinaan Rohani dan Mental Pegawai

Kegiatan ini dianggarkan untuk empat kali kegiatan dan telah terlaksana sebanyak empat kali dengan memperhatikan prokotol kesehatan.

2. Press Release

Kegiatan Pres release dilaksanakan sebanyak tujuh kali sepanjang tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pengungkapan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika jenis shabu sebanyak 1,5 kg jaringan Aceh dan Banjarmasin (15 Februari 2021).

(2) Pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis ganja seberat +/- 450,5 gram, dan narkotika jenis shabu seberat +/- 200gram (25 Juni 2021).

(3) Pengungkapan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika jenis ganja dengan modus melalui jasa pengiriman, dan shabu dengan modus disimpan dalam sol sendal/sepatu (23 Juli 2021).

(4) Pengukuhan duta anti narkotika 2021 Provinsi Kalimantan Tengah (16 Agustus 2021).

(5) Pengungkapan 3 jaringan sindikat peredaran gelap narkotika jenis shabu seberat 1.250,85 gram (1 Oktober 2021).

(6) Pengungkapan kasus narkoba di kampung Puntun Palangkaraya, dan Pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu (22 Oktober 2021).

(7) Press release akhir tahun 2021 BNNP Kalteng (29 Desember 2021).

3. Penyediaan Informasi Publik

Penggunaan platform media sosial seperti website, Instagram, twitter, youtube dan facebook dimaksimalkan di masa pandemik. Di tahun 2021 humas BNNP Kalimantan Tengah aktif membuat konten secara rutin di semua media sosial BNNP Kalimantan Tengah.

Youtube : BNN Provinsi Kalteng

Instagram : @infobnn_prov_kalteng

Twitter : @infobnnpkalteng

Facebook : Info BNNP Kalteng

Website : www.kalteng.bnn.go.id

Contact Center : 082155124556

Sub Bagian Perencanaan

NO	KODE	INDIKATOR OUTPUT	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	3238.952	Layanan Perencanaan	15,810,000	15,810,000	100.00	7,992,000	7,992,000	100.00
2	3238.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	13,378,000	12,944,800	96.76	8,700,000	8,700,000	100.00
		JUMLAH	**29,188,000**	**28,754,800**	**98.52**	**16,692,000**	**16,692,000**	**100.00**

Dari segi penganggaran, untuk tahun 2021 jumlah anggaran berkurang dikarenakan adanya pemotongan anggaran untuk kebutuhan Covid-19 namun untuk penyerapan meningkat secara persentase dibandingkan tahun 2021.

Sepanjang tahun 2021 , kegiatan yang dilakukan pada Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Teknis Bidang Perencanaan Wilayah

Pada tahun 2021 diadakan dua kali pembinaan teknis bidang perencanaan dengan mengundang staf yang menangani perencanaan dan pelaporan di BNNK Kotawaringin Barat dan BNNK Palangka Raya. Materi bimtek ialah perencanaan penganggaran dan pelaporan.

2. Pembahasan Usulan Rancangan Awal Renja Satuan Kerja Vertikal BNN 2022

Pembahasan Usulan Rancangan Awal Renja Satuan Kerja Vertikal BNN 2022 adalah sarana bagi satker menyampaikan kebutuhan riilnya di lapangan kepada pusat sehingga nantinya saat pagu definitif keluar dari pusat sudah mengakomodir kebutuhan di BNNP Kalteng secara keseluruhan. Selain usulan ke Biro Perencanaan, ke depannya setiap Seksi harus berkoordinasi dengan deputinya sehingga setiap usulan penganggaran dikompilasi dan diusulkan kepada Biro Perencanaan. Selama ini usulan disampaikan ke Biro Perencanaan padahal yang membagi pagu untuk seksi di BNNP dan BNNK adalah dari Deputi.

3. Pembahasan Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Vertikal BNN 2022

Pada kegiatan pembahasan Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Vertikal BNN 2022 setiap fungsi menyampaikan rencana kinerjanya untuk tahun 2022 sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022 mendatang.

4. Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran Satuan Kerja BNN Provinsi

Penyusunan RKAKL 2022 dilaksanakan sebelum penginputan RKAKL pada aplikasi SAKTI sesuai pagu definitif yang telah disampaikan oleh BNN RI. Beberapa masalah yang terjadi dalam penyusunan RKAKL 2022 adalah;

1) Aplikasi SAKTI hanya bisa diisi secara online sehingga jika terjadi gangguan sinyal internet maka akan mengganggu kelancaran proses penginputan.

2) Server sempat down karena diakses bersamaan oleh BNNP dan BNNK se-Indonesia.

3) Standar Biaya Masukan dan Standar Aktivitas tidak mengakomodir kebutuhan di daerah.

5. Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran Wilayah

Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran Wilayah dilaksanakan dengan melakukan konsolidasi dengan perwakilan dari BNNK Palangka Raya dan BNNK Kotawaringin Barat bersama Pembina fungsi di BNNP Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan agar terdapat kesesuain rancangan RKAKL dan target outputnya .

6. Koordinasi Bidang Anggaran

Revisi anggaran ke Kanwil DJPB dianggarkan untuk 4 kali dan telah dilaksanakan. Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga berkali-kali anggaran direvisi untuk kebutuhan penanganan Covid-19. Selain tu kegiatan di satker harus menyesuaikan protokol kesehatan yang berlaku sehingga diperlukan revisi untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru.

7. Rapat Kesekretariatan Pelaksanaan Inpres RAN P4GN

Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir kegiatan pelaporan Inpres RAN P4GN selama tahun 2021. Pelaporan berlangsung dua kali dalam setahun namun untuk kegiatan rapat hanya berlangsung sekali. Di dalam rapat, disampaikan kendala dan cara pelaporan melalui aplikasi.

8. Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Vertikal 2021

Penyusunan perjanjian kinerja vertikal tahun 2021 merupakan sarana bertemunya target kinerja antara pusat dan daerah. Pusat dan daerah sama-sama merumuskan target kinerja sehingga tercapai kesepakatan mengenai kinerja yang harus dicapai.

9. Pelaporan Periodik Pelaksanaan Kinerja Program dan Anggaran 2021

Pelaporan periodik pelaksanaan kinerja program dan anggaran 2021 dilaksanakan bersama pusat untuk mengevaluasi kinerja program dan anggaran pada tahun berjalan sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi jika terjadi permasalahan dan mengetahui sejauh mana kinerja satker pad apertengahan tahun anggaran berjalan.

10. Konsolidasi Capaian Kinerja Program dan Anggaran 2021

Rapat konsolidasi capaian kinerja program dan anggaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat ini dilaksanakan sekali dalam setahun.Dalam kegiatan ini dilaporkan capaian output dan capaian kinerja BNNK Palangka Raya, BNNK Kotawingin Barat dan BNNP Kalimantan Tengah. Capaian kinerja akan diakumulasi di BNNP Kalimantan Tengah sebagai bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Walaupun belum final, namun update capaian kinerja ini dapat menjadi bahan dalam mempersiapkan laporan akhir tahun

11. Evaluasi On Going Kinerja Satuan Vertikal 2021

Rapat evaluasi on going kinerja bertujuan untuk update progress capaian kinerja dan kendala yang terjadi sehingga dapat dilakukan langkah antisipasi sebelum tahun anggaran berakhir. Antisipasi diperlukan supaya target yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun anggaran 2021. Rapat Evaluasi On Going Kinerja Satuan Kerja Vertikal 2021 dilaksanakan pada tanggal 16 November 2021 di Ruang Rapat Kantor BNN Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan diikuti oleh Kepala Bagian Umum, operator aplikasi Monevgar, Kasubag Umum BNNK Palangka Raya dan BNNK Kotawaringin Barat dan perwakilan dari setiap bidang di BNNP Kalimantan Tengah.

Sub Bagian Sarana dan Prasarana

Secara garis besar anggaran yang diterima sarpras di TA 2021 dibanding TA 2020 mengalami kenaikan dimana pada TA 2020 dana yg dikelola sebesar Rp.1.732.462.000,- dan pada TA 2021 dana yg dikelola sebesar Rp. 2.012.474.000,-

Kendala dan hambatan yang dialami oleh bagian sarpras selama TA 2021 adalah sebagai berikut

1. Dana operasional sehari hari minim dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang ada.
2. Pandemi covid-19 membuat kebutuhan non operasional membengkak sehingga harus dilakukan penyesuaian/revisi anggaran.

3. Usia peralatan kantor terutama AC yang sudah tua memerlukan biaya pemeliharaan yang besar dan sangat boros listrik, sementara dana pengadaan baru tidak dapat dilakukan karena terbentur minimnya anggaran.
4. Bertambahnya usia pemakaian gedung berakibat pula pada meningkatnya jumlah kerusakan pada fisik gedung bangunan sementara anggaran yang tersedia hanya dapat dipakai untuk melakukan pemeliharaan kecil saja atau minor maintenance sementara kebutuhan yang utama tidak dapat dilakukan.
5. Bertambahnya personel dan kebutuhan organisasi dimana memerlukan ruangan untuk terlaksananya kegiatan ini menjadi kendala terbesar karena jumlah ruangan yang sangat terbatas di BNNP Kalteng dan tidak mungkin ditambah atau di *split* ruangannya.

Output kegiatan dari bagian sarpras pada TA 2021 dapat dsimpulkan sebagai berikut :

a. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
   - Pada TA 2021 telah dilaksanakan pengadaan 8 unit printer, dan 2 unit kamera digital untuk menunjang bidang kehumasan.

b. Layanan Manajemen Barang Milik Negara
   - Pada TA 2021 bagian sarpras melakukan penghapusan BMN yang rusak berat sebanyak 1x yaitu bulan bulan Desember 2021
   - adapun BMN yang rusak berat yang dihapus adalah
     1. 16 unit cctv
     2. 10 buah Kasur matras
     3. 1 TV 40”

c. Layanan Umum
   - Pada TA 2021 telah dilaksanakan 4 kali Rapat kinerja teknis dengan mengundang para stake holder yang berkaitan dengan P4GN
   - Pada TA 2021 telah dilaksanakan 1 kali latihan menembak bertempat di lapangan tembak Polda Kalimantan Tengah dengan tetap memberlakukan Protokol Kesehatan.
   - Pada TA 2021 telah diadakan koordinasi kelembagaan dengan titik fokus utama melakukan pembinaaan ke satker BNNK di Kalimantan Tengah dan melakukan koordinasi dan sosialisasi ke pemda pemda di Kalimantan Tengah yang belum memiliki BNNK untuk kerjasama dengan pemerintah daerah

setempat dalam melaksanakan Inpres no 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Adapun dari 14 kabupaten/kota yang terdapat di Kalimantan Tengah sudah 10 Kabupaten yang sudah dikunjungi.

- Kondisi pandemi covid-19 dan jauhnya jarak tempuh dan medan yg berat juga menjadi salah satu faktor utama sehingga tidak semua kabupaten dapat dikunjungi selama TA 2021.

d. Layanan Perkantoran

- Secara umum pelaksanaan layanan perkantoran berpusat pada pembiaayaan operasional kantor dan rumah tangga kantor
- Pada TA 2021 dengan menggunakan anggaran yang ada maka telah dilaksanakan balik nama 4 unit kendaraan dari yang sebelumnya atas nama BNN RI menjadi atas nama BNNP Kalteng. dan juga pada TA 2021 ini berhasil mengurus duplikat BPKB kendaraan APV dari yang sebelumnya hilang sehingga selalu menjadi temuan irwas dan akhirnya di tahun ini dapat dibuatkan Duplikat aslinya dan sekaligus merubah namanya dari sebelumnya a.n BNP Kalteng menjadi a.n BNNP Kalimantan tengah serta menyeelsaikan tunggakan pajak STNK selama 5 tahun.
- Pada TA 2021 juga bagian sarpras berhasil m3ngurus sertifikat tanah Kantor BNNP Kalteng sebesar 2595 m²

Pada TA 2021 ini sebagai bentuk dukungan Pemda Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Inpres no 2 tahun 2020 telah dibanguun klinik rehabilitasi yang dibangun di belakang kantor BNNP Kalimantan Tengah.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021

Tahun 2021 BNNP Kalimantan Tengah dan jajaran mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar dengan total penyerapan anggaran sebesar Rp.7.631.636.000,. Sedangkan realisasi BNNP Kalimantan Tengah adalah:

FORM REALISASI WILAYAH BNNP KALIMANTAN TENGAH TA 2021							
	Satuan Kerja	DIPA 2021	Penyerapan	%	Target Output	Realisasi Output	%

1	BNNP KALTENG	**4,339,554,000**	**4,289,024,539**	98,84	114	145	127,19

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pelayan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Provinsi Kalimantan Tengah, telah dapat merealisasikan berbagai capaian melalui implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Tugas mulia yang diemban BNN Provinsi Kalimantan Tengah adalah mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tugas tersebut merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan BNN Provinsi Kalimantan Tengah sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara Negara dan penegak hukum, baik ditingkat pusat maupun daerah, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut. Hal ini disebabkan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan penyakit masyarakat yang penanganannya pun harus melibatkan seluruh komponen masyarakat bangsa dan Negara.

Capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan capaiannya.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran BNN Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2021. Capaian kinerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 telah dilakukan dengan berbagai upaya yang optimal untuk mencapai target sebagaimana yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja BNN Provinsi Kalimantan Tengah.

Kesimpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali guna mengetahui kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governant) di lingkungan BNNP Kalimantan Tengah. Dengan demikian LAKIP ini merupakan bagian integral dari proses pelaksanaan pembangunan yang perlu dilaksanakan secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap berbagai upaya yang dilakukan BNN dalam meningkatkan upaya P4GN di Provinsi Kalimantan Tengah.